

Diplomasi Daerah Jawa Barat dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Windy Dermawan¹, Ichsanul Amal², Gilang Nur Alam³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

windy.dermawan@unpad.ac.id

Abstract

West Java is one of the provinces in Indonesia that has been affected by the spread of Covid-19. The West Java Provincial Government is trying to deal with the Covid-19 virus through overseas activities. This has shown the efforts of the West Java Provincial Government's efforts to overcome the medical case while trying to maintain the sustainability of the regional economy through its diplomatic activities. West Java's regional diplomatic activities in the Covid-19 era have confirmed the role of regions abroad that meet regional needs and contribute to national interests. This research aims to describe West Java's regional diplomacy in dealing with the Covid-19 pandemic, both in terms of health and economy to meet the security of West Java residents. The approach method in this research uses a qualitative method with a descriptive nature, data collection is carried out through literature studies, documentation studies and internet-based studies. The concept used in this research is Regional Diplomacy. This research found that West Java carried out its regional diplomacy to deal with Covid-19 by facilitating cooperation in improving health services, research on vaccinations to support regional health management. This research also found that both provincial actors and city and district actors in West Java to non-governmental actors such as universities carried out their regional diplomacy. This further strengthens the role of regional actors abroad to meet the needs of their regions.

Keywords

Covid-19, Regions Diplomacy, West Java, pandemic, health.

Pendahuluan

Globalisasi memberikan pengaruh bagi tatanan teori dan praktik diplomasi dalam hubungan internasional. Merujuk pada penjelasan Cooper dan kawan-kawan (2013), keberadaan globalisasi telah memperluas ruang lingkup kegiatan diplomatik yang tidak hanya pada pemeliharaan perdamaian, tetapi juga pada masalah-masalah yang mencakup lingkungan, kesehatan, budaya dan kemanusiaan. Selain itu Cooper (2013) dan Kutnezsov (2015) juga menambahkan bahwa, kini organisasi nonpemerintah, organisasi internasional, perusahaan multinasional, subnasional dan subnegara mulai terlibat dalam aktivitas diplomasi sebagai bentuk perkembangan yang diakibatkan oleh globalisasi pada kegiatan-kegiatan hubungan internasional. Maka dari itu, perkembangan ini pada dasarnya telah membentuk praktik diplomasi yang kini tidak hanya terbatas aplikasinya pada negara-negara, tetapi juga pada aktor subnegara dan subnasional yang dalam konteks tulisan ini adalah diplomasi daerah Jawa Barat pada sektor kesehatan dan keamanan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Pandemi Covid-19 sejatinya telah mendatangkan malapetaka pada ekonomi global. Menimbang bahwa sebagian besar kehidupan

sehari-hari umat manusia sekarang berada dalam bahaya besar akibat dari bencana kesehatan global ini. Terlepas dari kenyataan bahwa virus ini baru, tetapi bukan yang pertama dari jenisnya. Kasus virus corona pertama didiagnosis sebagai flu pada tahun 1960. Pada tahun 2001, sebuah penelitian di Kanada menemukan bahwa sekitar 500 orang telah terinfeksi bakteri mirip flu (Alam et al., 2021). Dari mereka, 17–18 kasus dilaporkan sebagai reaksi berantai polimerase yang terinfeksi virus corona. Hingga 2002, para dokter menganggap virus corona sebagai wabah non-fatal yang sering terjadi (Alam et al., 2021). Sejak tahun 2003, banyak artikel yang diterbitkan telah menunjukkan penyebaran virus corona di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, China (khususnya Hong Kong), Singapura, Thailand, Vietnam, dan Taiwan. Tidak hanya itu, pada tahun 2003, virus corona menyebabkan sejumlah besar kasus sindrom pernapasan akut yang intens. Pada tahun selanjutnya, WHO dan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit mengumumkan keadaan darurat di seluruh dunia sebagai tanggapan atas angka kematian yang luar biasa (Alam et al., 2021). Pada 31 Desember 2019, pihak berwenang China memberi tahu WHO tentang beberapa kasus pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui. Otoritas Riset China kemudian melaporkan 44 kasus pneumonia per

3 Januari 2020, menunjukkan bahwa virus baru tersebut berasal dari bisnis makanan laut di Wuhan pada 7 Januari 2020. 2019-nCoV adalah nama yang diberikan untuk virus ini (Kumar et al. 2020; Alam et al., 2021).

Pandemi ini memiliki dampak yang signifikan pada negara-negara berkembang, mempengaruhi tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga seluruh spektrum sosial ekonomi. Ketidakseimbangan upah di negara-negara ini diperkirakan melebihi \$220 miliar. Sekitar 55 persen dari populasi dunia akan kekurangan akses ke layanan sosial, menyebabkan peningkatan besar-besaran dalam pengangguran, kurangnya hak-hak sipil, dan akses terbatas ke ketahanan pangan. Kepadatan yang disebabkan oleh pasien, serta kekurangan bahan sanitasi seperti sabun dan air untuk setidaknya 75 persen orang di negara kurang berkembang atau berkembang, dapat menimbulkan permasalahan yang berpotensi fatal di rumah sakit dan klinik (Ward, 2020). Kasus tersebut dapat ditemukan di negara-negara seperti Madagaskar, Iran, Vietnam, Panama, Ukraina, Serbia, Paraguay, Nigeria, Kirgistan, Cina, Eritrea, El Salvador, Djibouti, Herzegovina, dan Bosnia dan Herzegovina. Masalah sosial ekonomi lainnya, seperti perencanaan kota yang buruk dan kepadatan penduduk,

infrastruktur pembuangan limbah yang tidak memadai, dan bahkan kemacetan lalu lintas, akan menghambat akses masyarakat ke layanan kesehatan dan menambah beban kerja medis (Wingard 2020).

Semua negara yang terkena dampak hampir tidak siap untuk menghadapi tantangan dan kerugian yang nyata dalam dari pandemi ini terhadap sektor perawatan kesehatan dan sektor ekonomi lainnya. Indonesia sebagai negara berkembang belum merespons krisis dengan baik karena pemerintah harus melindungi banyak masalah keamanan nasional non-tradisional seperti kebijakan publik, kesehatan, kohesi sosial, konsumsi barang/jasa sehari-hari, manajemen rantai pasokan nasional, dll., yang sekarang terkena dampak buruk COVID-19 (Nainggolan, 2020). Menurut *Center for Strategic and International Studies* atau CSIS (2021), Indonesia memiliki jumlah kasus Covid-19 terbesar di Asia Tenggara, dengan 1 juta kasus dan tingkat kematian sekitar 30.000 orang. Indonesia menjadi negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara sejauh ini. Hal ini dikarenakan kegiatan pemerintah Indonesia di beberapa provinsi untuk semakin melonggarkan pembatasan perjalanan dan pembatasan berkumpul. Langkah ini diambil pemerintah Indonesia dalam upaya membuka kembali dan menggenjot kegiatan ekonomi di tengah wabah yang mendunia. Sementara itu,

dilaporkan bahwa jumlah sebenarnya kasus Covid-19 di Indonesia telah melampaui perkiraan resmi pemerintah mulai Januari 2021. Menimbang Indonesia adalah negara kepulauan, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 terus meningkat, karena kurangnya ketersediaan dan distribusi vaksin. Kemudian, setelah Indonesia menjadi negara yang juga menyetujui penggunaan vaksin Sinovac, selain China, Indonesia memulai juga program vaksinasi pada pertengahan Januari 2021. Namun sayangnya, kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak karena pertama-tama ada kurangnya ketersediaan peralatan pengujian dan yang kedua adalah sistem, di mana perbatasan zona skala kecil yang tidak didukung dengan baik oleh pemerintah lokal (Ketchell 2021).

Covid-19 tiba di Indonesia tepatnya di daerah Jawa Barat, yaitu di Kota Depok. Menilik pada bahayanya dan untuk mencegah ketakutan warga di daerah ini, Pemda Jawa Barat sejatinya telah menggerakkan berbagai usaha untuk menghadapi pandemi di kawasannya. Beberapa tindakan yang diupayakan oleh pemerintah Jawa Barat adalah menaikkan status siaga bagi daerah kabupaten, kota di Jawa Barat, membuat inovasi penanganan Covid-19 berbasis daring melalui Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (PIKOBAR). Selain itu,

Pemprov Jawa Barat juga telah menerapkan kebijakan Adaptasi Kegiatan Baru sebagai bentuk peningkatan dari implementasi Pembatasan Sosial Skala Besar yang tercantum pada Pergub No. 47 Tahun 2020 (Herdiana, 2020).

Pandemi Covid-19 yang menimpa daerah Jawa Barat telah memberikan dampak yang eksponensial pada sektor-sektor ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengimplementasikan tindakan-tindakan yang bersifat penanganan, tetapi juga jangka panjang yang tercantum dalam rancangan pembangunan yang terdapat dalam Nota Kesepakatan Bersama Antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Jabar terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2021 untuk membenahi sektor-sektor ekonomi, sosial, dan kesehatan setelah diterpa pandemi Covid-19 (Abubakar, 2021). Walaupun begitu, pandemi global sejatinya perlu ditangani secara bersama sehingga pilihan untuk bekerjasama dengan pihak lain demi mempermudah penanganan Covid-19 di kawasannya masing-masing menjadi sangat penting. Pasalnya, terdapat kesenjangan yang sedemikian besar kepada akses vaksin dan fasilitas kesehatan yang baik antara negara maju dan negara

berkembang. Sehingga kini negara-negara maju mulai menjalin hubungan kerjasama dengan negara berkembang untuk mempercepat proses penanganan Covid-19 di wilayahnya (Purbantina & Hapsari, 2020). Tindakan seperti ini dapat digambarkan banyaknya negara-negara yang terjalin bekerjasama pendistribusian vaksin dan fasilitas kesehatan lainnya melalui diplomasi vaksin seperti yang telah dijalankan oleh Indonesia dengan Tiongkok. Dalam konteks tulisan ini, sejatinya tidak hanya pihak pusat saja yang bisa bekerjasama dengan entitas asing dalam menghadapi Covid-19 tetapi entitas daerah seperti Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat dan berbagai entitas lain didalamnya juga dapat menerapkan tindakan yang serupa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Adapun hal ini dimungkinkan menimbang bahwa dunia telah mengalami transformasi yang cukup signifikan sehingga beberapa hal baik dalam bentuk praktik maupun teori mengalami perubahan. Seperti dalam studi HI yang membenarkan bahwa praktik hubungan internasional kini tidak lagi dimonopoli oleh entitas negara tetapi aktor-aktor seperti NGO, MNC, dan aktor subnasional-subnegara juga dapat mengambil peran di dalamnya. Fenomena ini dalam studi HI termasuk dalam bagian bidang kaji Diplomasi Daerah dan Paradiplomasi.

Menariknya, sudah banyak sekali literatur yang menjelaskan hubungan luar negeri melalui diplomasi vaksin untuk membantu sektor kesehatan dan keamanan negara menghadapi pandemi Covid-19. Namun, dalam konteks daerah, tulisan yang mengeksplorasi hubungan luar negeri dan diplomasi daerah dalam konteks menghadapi pandemi dari sektor kesehatan dan keamanan masih terbatas diperhatikan. Oleh karena itu, untuk memperkaya sumber literatur diplomasi daerah dan paradiplomasi mengenai isu ini, penulis mengeksplorasi lebih lanjut mengenai diplomasi daerah, tepatnya daaerah Jawa Barat pada sektor keamanan dan kesehatan bersama entitas asing dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sejumlah literatur mengungkapkan mengenai pemaknaan paradiplomasi. McHugh (2015) menunjukkan bahwa paradiplomasi sebagai upaya daerah untuk memajukan kebutuhannya secara diplomatis baik pada level regional maupun global. Chatterji & Saha (2017) memaknai bahwa paradiplomasi sebagai upaya dari unit konstituen suatu negara untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui relasi dengan aktor luar negeri. Adapun sifat dari paradiplomasi yang dikaitkan dengan diplomasi negara adalah bahwa paradiplomasi bersifat mengoreksi, memperlengkapi, menantang, ataupun menduplikasi

bentuk-
bentuk diplomasi yang dilakukan oleh negara asalnya (Duchacek, 1990; Soldatos, 1990).

Selanjutnya, riset ini juga telah memetakan studi-studi terdahulu yang relevan dengan tulisan ini. Studi dari Jackson (2018); Luerdi (2022); Pasan (2017) menunjukkan kiprah pemerintah daerah dalam upaya paradiplomasi dalam menjalankan kebijakannya untuk pemenuhan kebutuhan daerah. Selanjutnya, Grydehøj (2014), Pietrasiak et al. (2018) dan Tavares (2016) menunjukkan upaya aktor subnasional melalui paradiplomasi dalam beragam aspek untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi daerahnya. Beberapa studi terdahulu di atas telah menunjukkan bagaimana kiprah aktor subnegara di fora internasional, namun masih terbatas studi mengenai kiprah aktor subnegara, khususnya Jawa Barat dalam menghadapi Covid-19 untuk kebutuhan keamanan kesehatan dan relasinya dengan konteks ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, tulisan ini mengeksplorasi mengenai diplomasi daerah Jawa Barat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, studi pustaka dan studi

berbasis internet. Data-data yang terkumpul diantaranya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Jawa Barat baik aktor governmental maupun sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19, jumlah warga Jawa Barat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara mengalir, dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data yang terkumpul, display data dan penarikan simpulan. Validitas data dilakukan untuk menjaga agar data yang terkumpul bersifat intersubjektivitas dan menghindari validity threat. Dengan menjaga validitas data, diharapkan mendapatkan data yang valid untuk selanjutnya diolah, dianalisis dan ditarik simpulannya.

Diskusi

Penulis memberikan gambaran lebih lanjut mengenai posisi daerah dalam penanganan Covid-19 baik dalam skala hubungan internal antar birokrasi dalam tingkat nasional dan juga melihat posisi daerah dari segi hubungan eksternal seperti berkerjasama dengan entitas asing lainnya dalam penanganan Covid-19. Dalam bagian yang kedua, penulis merincikan secara umum usaha-usaha yang dilakukan oleh daerah di Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pada bagian ketiga, penulis akan

mengeksplorasi lebih lanjut mengenai kiprah daerah Jawa Barat, baik sebagai entitas pemerintahan daerah maupun entitas daerah lainnya seperti universitas atau kelompok-kelompok tertentu, dalam berdiplomasi daerah dengan entitas asing demi mendukung usaha-usaha penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilaksanakan di wilayahnya.

Relevansi Keamanan Manusia dan Kesehatan

Tidak hanya diplomasi yang mengalami perkembangan dari segi konseptual, konsep ancaman keamanan sekarang juga mengalami perkembangan sehingga tidak hanya berfokus pada ancaman bagi keamanan nasional-tradisional, tetapi juga pada ancaman-ancaman yang lebih mengancam manusia sebagai objek referensi-atau ancaman non-tradisional. UNDP (2006) dalam laporannya mendefinisikan ancaman keamanan non-tradisional sebagai keamanan manusia yang meliputi keamanan dari ancaman kelaparan, penyakit menular, penindasan atau ketidakstabilan politik, dan upaya perlindungan dari gangguan yang mengancam kehidupan sehari-hari di rumah dan masyarakat. Lebih khusus lagi, UNDP juga mengidentifikasi tujuh elemen kebutuhan dasar keamanan manusia. Ini termasuk 1) keamanan ekonomi; 2) keamanan pangan; 3) keamanan

kesehatan; 4) keamanan lingkungan; 5) keamanan pribadi; 6) keamanan masyarakat; dan 7) keamanan politik (UNDP, 2006).

Sejak tahun 1990-an, perkembangan penyakit menular, pandemi HIV/AIDS, dan penggunaan persenjataan bioterorisme telah menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan kesehatan secara global. Tidak hanya itu, globalisasi diiringi dengan peningkatan migrasi lintas batas, operasi ekonomi dan perdagangan, dan perjalanan wisata tanpa batas telah mendorong meningkatnya penyebaran penyakit-penyakit yang dapat membahayakan kesehatan global (Purbantina & Hapsari, 2020). Pandemi Covid-19 ini pun sejatinya contoh dari kebukuran yang dapat dihasilkan oleh globalisasi, sehingga mendorong pemerintah di banyak negara untuk memberlakukan kebijakan lockdown sebagai langkah pengamanan untuk mencegah penyebaran lebih luas dan menambah jumlah korban.

Pertumbuhan Covid-19 tidak hanya menciptakan ketidakstabilan sosial dan mengancam stabilitas negara dengan kejatuhan ekonomi yang besar, tetapi juga menawarkan ancaman langsung terhadap kesehatan manusia di sejumlah negara di dunia. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, ada 7.782.809 kasus Covid-19 di lebih dari 200 negara per 15 Juni 2020, dengan total 430.613 kematian di

seluruh dunia (BBC News, 2020). Di setiap negara, jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 berbeda-beda. Di negara-negara tertentu, jumlah kasus pasien yang terinfeksi mulai turun atau telah melewati puncaknya, dan di negara lain, terus bertambah. Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Menurut statistik Kementerian Kesehatan, ada 39.294 kasus orang yang terinfeksi hingga 15 Juni 2020, dengan total 2.198 kematian. Berdasarkan angka tersebut, Indonesia menempati urutan ke-22 dunia dalam hal jumlah kematian akibat Covid-19. Jika tidak segera ditangani, penyebaran Covid 19 berpotensi membahayakan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia.

Sejak tahun 2007, WHO telah memulai *Global Health Diplomacy*, yang merupakan semacam komitmen dan kerjasama multilateral yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia, dalam rangka mengatasi tantangan kesehatan global. Diplomasi Kesehatan Global mengacu pada proses negosiasi multi-level dan multi-pelaku yang digunakan untuk mengatur kebijakan kesehatan global (Kickbusch, 2007). Diplomasi kesehatan global berfungsi sebagai katalis untuk tata kelola kesehatan global dengan mendorong pembentukan perjanjian dan kesepakatan internasional, baik multilateral maupun bilateral.

Terkait penanganan Covid-19, WHO dalam kerangka *Global Health Diplomacy*, mendorong komitmen politik dan koordinasi politik di tingkat global, khususnya di antara para pemimpin negara-negara kelompok G20, untuk mendorong kerja sama peningkatan produksi alat pelindung diri, menghindari larangan ekspor, dan memastikan distribusi peralatan yang adil. - peralatan medis yang perlu diketahui (BBC News Indonesia, 2020). Selanjutnya pada tanggal 2 April 2020, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi A/74/L.52 tentang Solidaritas Global Melawan Covid-19 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Resolusi tersebut menyatukan upaya di seluruh dunia untuk meminimalkan dan mengatasi Covid-19 melalui solidaritas dan kolaborasi. Dalam hal ini disebutkan pentingnya kerjasama internasional yang lebih kuat dalam pengendalian, mitigasi, dan penanggulangan pandemi, serta komitmen untuk membantu masyarakat, khususnya yang rentan, dan mengakui upaya pemerintah di berbagai negara yang menawarkan bantuan dan dukungan sebagai bentuk solidaritas dan hubungan yang saling menguntungkan (Purbantina & Hapsari, 2020). Mengingat pandemi mempengaruhi baik negara maju maupun negara miskin, komitmen ini pada dasarnya memberikan akses kesehatan bagi semua orang di tingkat nasional, regional, dan

Walaupun begitu, Covid-19 sejatinya tidak hanya berdampak pada negara secara keseluruhan, tetapi dalam tingkatan birokrasi yang paling bawah (baca: kota dan daerah), yang juga membawa permasalahan serupa. Tidak hanya itu, seiring berkembangnya desentralisasi pemerintahan, otoritas daerah dan lokal kini memiliki kapasitasnya tersendiri untuk memformulasikan suatu tindakan mandiri (dengan tidak melangkahi kepentingan nasional) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dalam konteks ini, aspek kerjasama luar negeri dalam menghadapi pandemi Covid-19 sejatinya juga dapat dipraktikkan oleh pemerintah daerah dan lokal untuk mengakomodir penanganan Covid-19 yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya, penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai keterlibatan daerah dalam tata kelola kesehatan global serta bentuk nyata dari partisipasi daerah Jawa Barat dalam hal tersebut untuk menghadapi pandemi Covid-19 baik dari segi kesehatan maupun keamanan.

Posisi Daerah dalam Pandemi Covid-19

Pemerintah tingkat nasional dan negara bagian memimpin usaha penanganan darurat Covid-19 di hampir semua negara (UCLG, 2020). Pada saat yang sama,

pemerintah daerah mengambil peran sebagai penyedia layanan, pelaksana dan operator darurat di lapangan (UCLG, 2020; OECD, 2020). Covid-19 memiliki dampak asimetris di seluruh wilayah, tetapi banyak respons kebijakan buta-tempat dan cenderung seragam (OECD, 2020). Sebaliknya, menurut OECD (2020), pendekatan berbasis tempat dan berpusat pada masyarakat sangat dibutuhkan (OECD, 2020). Morisson & Doussineau (2019) mendefinisikan kebijakan berbasis tempat sebagai 'strategi jangka panjang yang ditujukan untuk mengatasi pemanfaatan yang terus-menerus dari potensi dan mengurangi pengucilan sosial yang terus-menerus di tempat-tempat tertentu melalui 'intervensi eksternal dan tata kelola multilevel', sementara daerah tidak selalu setara ketika merancang dan menerapkan kebijakan berbasis tempat karena perbedaan kualitas pemerintah dan kapasitas mereka untuk menyerap dana dan kemampuan institusional mereka (Morisson & Doussineau, 2019). Reformasi tata kelola berbasis tempat sangat penting untuk mempercepat tanggapan dari pemerintah daerah terhadap krisis kesehatan dan iklim global, bencana alam yang ekstrem dan terus berkembang, kesenjangan, kerusakan, guncangan sosial-ekonomi dan politik, dan permasalahan global lainnya yang lebih rapuh seperti ekonomi (UCLG,

2020).

Dimensi daerah tidak boleh dilupakan, seperti – menurut Bailey et al. (2020), masalah ekonomi yang disebabkan oleh pandemi saat ini cenderung spesifik berbeda-beda tiap wilayah dan daerah (Bailey et al, 2020). Dampak ekonomi akan bervariasi dengan melihat kondisi basis industri lokal dan daerah secara umum (Bailey et al, 2020), menimbang bahwa sebagian daerah bertindak sebagai pendorong utama inovasi yang sangat penting dalam situasi saat ini. Kebijakan nasional tidak akan cukup untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan ini, sehingga pendekatan kebijakan khusus daerah sangat penting dalam memahami masalah tersebut (Bailey et al, 2020). Sementara koordinasi tindakan kebijakan di tingkat supra-nasional dan nasional sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan, tantangan ekonomi dan lingkungan, kebijakan khusus kawasan juga perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan heterogenitas wilayah dan tata ruang dari dampak Covid-19 yang tidak merata (Bailey et al, 2020)

Dalam konteks Hubungan Internasional, Covid-19 telah menyebabkan perubahan di segala bidang dan akan terus memberikan pengaruh terhadap institusi sosial, ekonomi, dan politik. Isu ini bukan hal baru dalam ranah hubungan internasional, di mana multilateralisme yang sudah babak belur menghadapi tantangan baru

yang membahayakan interdependensi global. Pemerintah subnasional pun dipaksa untuk beradaptasi baik dari segi tata kelola pemerintahannya (seperti yang sudah dijelaskan di atas) hingga aktivitas hubungan luar negerinya baik dalam konteks paradiplomasi maupun diplomasi daerah. Selama krisis global saat ini, diplomasi daerah telah menunjukkan bahwa ia memiliki peran untuk dimainkan. Internasionalisasi pemerintah daerah, khususnya melalui kolaborasi terdesentralisasi, membantu kelompok daerah secara langsung (Alvarez, 2020). Seperti misalnya, Barcelona (Spanyol) yang telah setuju untuk menginvestasikan 400.000 euro untuk memerangi Covid-19 di tempat-tempat seperti Amman (Yordania), Sada (Lebanon), Tetouan (Maroko), dan Maputo (Mozambik), antara lain. Demikian pula, Frankfurt (Jerman) telah menyumbangkan 10.000 euro ke Milan (Italia) untuk membantu memerangi pandemi. Pemerintah daerah di Amerika Selatan, yang saat ini mengalami musim dingin dan kemungkinan pandemi terburuk, juga telah beralih ke praktik hubungan internasional mereka. Misalnya, provinsi Córdoba di Argentina menggunakan perangkat *sister city* dengan kota metropolitan Chongqing di Tiongkok untuk membeli persediaan medis (Alvarez, 2020). Demikian pula, wilayah Bo Bo Chili yang menggarisbawahi hubungan historisnya dengan

provinsi Hubei di China untuk mendapatkan masker yang diperlukan untuk memerangi pandemi (Alvarez, 2020).

Dalam hal kolaborasi terdesentralisasi, jaringan kota mengkonsolidasikan wilayah mereka, menyerap situasi dari sudut pandang lokal dan mengusulkan strategi untuk mengembangkan strategi pemulihan. Misalnya, UCLG dan UN-Habitat menciptakan "Pengalaman Pembelajaran Langsung *#BeyondTheOutbreak*," yang mencakup topik terkait pandemi antara lain seperti pembangunan sosial, perumahan, orang jalanan, transportasi perkotaan, bisnis lokal, pencegahan kekerasan gender dan kekerasan dalam keluarga, dan kelompok minoritas lainnya (Alvarez & Oddone, 2020). Demikian pula, Mercociudades, Metropolis, ALAS, dan C40 telah menyelenggarakan acara virtual yang membahas komponen lokal pandemi dari berbagai sudut pandang dan pendekatan. Akibatnya, COVID-19 tidak hanya berdampak pada daerah, tetapi juga mengkonfigurasi ulang jaringannya atau singkatnya pandemi menggambarkan sebuah kondisi yang mana hubungan luar negeri daerah perlu ditinjau ulang (Alvarez, 2020).

Walaupun demikian, alih-alih meningkatkan proses resentralisasi, pandemi mendorong kota-daerah untuk mencari

tanggapan secara cepat. Pada gilirannya, mempromosikan kembali artikulasi internasional melalui jaringan. Tentunya hal tersebut sangat relevan dalam kasus negara-negara dalam posisi kepemimpinan yang tidak kapabel dalam penanganan pandemi di mana kota dan daerah harus menghadapi tidak hanya tantangan pandemi tetapi juga hambatan yang dihasilkan oleh ketidakpedulian pemerintah pusat mereka (ini, misalnya, kasus Curitiba di Brasil dan Los Angeles di Amerika Serikat). Dalam kasus ini, kerja paradiplomatik dan jaringan internasional telah menjadi dukungan terpuji dan kunci untuk memungkinkan walikota dan pemerintah daerah berdialog dan mencari solusi politik horizontal (Alvarez & Oddone, 2020).

Sejalan dengan peningkatan inisiatif ini, negara juga telah melakukan kontrol yang lebih besar atas bidang-bidang yang, meskipun terbatas dalam kompetensi eksklusif mereka, telah dilonggarkan selama kebangkitan globalisasi. Di bawah terang ini, pemerintah pusat telah menerapkan pembatasan transit gratis, memperketat kontrol perbatasan dan memperkuat kehadiran mereka dalam hubungan internasional. Selain itu, internasionalisasi pemerintah daerah menghadapi dinamika ganda (Alvarez, 2020). Di satu sisi, negara-negara telah meningkatkan kehadiran mereka di arena internasional melalui tanggapan

terhadap krisis. Di sisi lain, negara tampaknya telah menyimpang dari organisasi multilateral (sudah dipertanyakan sebelum pandemi). Ini telah mendukung fragmentasi adegan global dan tampaknya telah meningkatkan tingkat persaingan (misalnya, untuk pasokan medis). Hal ini juga mempengaruhi pemerintah daerah, yang seringkali harus berhadapan dengan pemerintah pusat terkait keadaan yang terkait dengan pandemi (Alvarez & Oddone, 2020). Misalnya, penutupan perbatasan membuat kontingen besar migran terdampar tanpa pekerjaan di banyak kota, membuat otoritas lokal bertanggung jawab untuk menangani situasi yang ditimbulkan oleh pemerintah pusat (seperti yang dilakukan de city of Iquique di Chili). Juga, banyak unit sub-negara bagian mengharuskan negara bagian mereka untuk mendeklarasikan karantina di wilayah mereka atau bahkan melakukan deklarasi sepihak seperti yang terlihat di negara bagian Jalisco di Meksiko dan negara bagian So Paulo di Brasil (Alvarez, 2020).

Oleh karena itu, pandemi memiliki dampak ganda pada aktivitas luar negeri daerah. Di satu sisi, kehadiran negara mendapatkan kembali keunggulannya di kancah global (baik secara efektif maupun relatif), ini dapat membahayakan saling ketergantungan yang diperoleh selama kebangkitan

globalisasi dan, pada gilirannya, menghambat internasionalisasi unit sub-negara. Di sisi lain, pemerintah non-pusat juga berinovasi dalam hubungan mereka dan menghasilkan ruang kerja sama baru, yang berkontribusi pada pengembangan diplomasi daerah (Alvarez, 2020).

Namun, ada komponen ketiga yang dapat menghasilkan perubahan substantif tentang bagaimana pemerintah non-pusat sejauh ini menginternasionalkan: penggunaan platform virtual untuk mengadakan pertemuan internasional. Penutupan perbatasan dan pengurangan lalu lintas udara di tingkat internasional, serta pembatasan sosial dan karantina di tingkat domestik, telah berdampak langsung pada kongres, KTT, seminar, dan pertemuan tatap muka lainnya yang diadakan. dijadwalkan selama tahun 2020. Praktis, semua pertemuan ini telah dibatalkan, dijadwalkan ulang atau dipindahkan ke platform digital. Yang terakhir memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan partisipasi yang lebih kecil antara pemerintah menengah dan lokal (Alvarez, 2020). Munculnya platform virtual untuk mengadakan pertemuan, baik pertemuan biasa maupun seminar tentang mata pelajaran tertentu seperti kesehatan, gender, transportasi atau ekonomi, membuat praktik paradiplomatik tersedia untuk semua pemerintah non-pusat dan tidak hanya bagi mereka yang memiliki sumber daya

dan waktu yang diperlukan untuk memulai perjalanan internasional (Alvarez, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya telah memastikan posisi daerah dalam tata kesehatan global sebagai otoritas lapangan yang mampu memformulasikan kebijakan demi mendorong kemaslahatan masyarakatnya sesuai dengan dampak yang diterima oleh Covid-19, tetapi juga mendorong daerah untuk berdiplomasi dengan entitas asing dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan medis dan lainnya dalam usaha menghadapi pandemi ini. Untuk memberikan gambaran lebih jelas bagaimana salah satu daerah di Indonesia merespon hal serupa, dalam bagian selanjutnya penulis akan memaparkan lebih jauh mengenai gambaran umum respon daerah di Indonesia dalam penanganan pandemi, serta bagaimana kiprah diplomasi daerah yang dilaksanakan oleh khususnya daerah Jawa Barat dalam menghadapi Covid-19 baik dalam sektor kesehatan maupun keamanan.

Respon Daerah dalam menghadapi Covid-19

Dampak pandemi virus corona di Indonesia telah menghancurkan, menewaskan sedikitnya 17.000 orang, menyebabkan hilangnya lebih dari 2,6 juta pekerjaan, dan kontraksi

3,5% dari PDB (Human Rights Watch, 2021). Hamparan geografis Indonesia membuat sulit untuk melawan pandemi virus corona tanpa mengerahkan pemerintah provinsi. Ciri-ciri geologis negara yang berpenduduk lebih dari 275 juta jiwa yang tersebar di 17.500 pulau dengan luas wilayah 2 juta km² menghadirkan tantangan logistik yang unik dalam meningkatkan respons Covid-19. Karena keragaman yang luas dari kepulauan Indonesia, efektivitas respon bervariasi di berbagai daerah. Karena penguatan peran pemerintah provinsi dalam pemberian layanan, termasuk layanan kesehatan masyarakat, telah menjadi fokus reformasi desentralisasi pemerintah, provinsi memainkan peran penting dalam empat bidang dalam memerangi pandemi virus corona, diantaranya yaitu meningkatkan tingkat pemberian layanan kesehatan masyarakat lokal: Di Indonesia, penyediaan layanan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab provinsi. Pada awal pandemi, pemerintah provinsi membentuk struktur komando dan kontrol untuk manajemen pandemi sebagai bagian dari Pusat Operasi Darurat mereka, untuk menanggapi krisis kesehatan.

Pemerintah provinsi Jawa Barat juga mengembangkan rencana darurat untuk respons pandemi yang mencakup isu-isu seperti pelaporan kasus dan analisis tingkat keparahan pandemi, penimbunan alat pelindung diri, ketersediaan tempat tidur ICU,

dan penyaringan penumpang di titik masuk dan keluar. Namun, ada kesenjangan besar dalam infrastruktur kesehatan provinsi. Sebagian besar tenaga kesehatan, misalnya, berada di pulau Jawa dan Sumatera. Menanggapi peningkatan rawat inap karena Covid-19 telah memberikan tekanan tambahan pada infrastruktur kesehatan dari fasilitas kesehatan yang sudah kekurangan staf di provinsi-provinsi yang lebih kecil. Oleh karena itu, beberapa provinsi terkena dampak yang lebih parah daripada yang lain. Misalnya, Nusa Tenggara Timur hanya memiliki sekitar 113 kasus per juta orang sedangkan Kalimantan Timur sekitar 12.000 kasus per juta orang. Provinsi sebagian besar memiliki antara 500 dan 2000 kasus per juta (Huhn, 2020). Laboratorium pengujian Covid-19 tingkat provinsi telah dibentuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten, dan puskesmas. Namun, karena tidak adanya standar dan persyaratan yang jelas, pendirian laboratorium untuk pengujian membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya, di Aceh butuh waktu sebulan untuk membangun laboratorium pengujian (Daniel & Adriyan, 2020). Selain itu, kit pengujian mulai digunakan tanpa mendefinisikan spesifikasi klinis dan akurasinya telah dilaporkan rendah (Djalantee et al., 2020). Pada November 2020, Jawa Tengah, Jakarta, dan Banten

mencapai tingkat pengujian yang direkomendasikan oleh WHO sementara provinsi lain masih berjuang hingga Desember 2020 (Wirawan & AyuSwandewiAstuti, 2020). Provinsi juga menghadapi kekurangan peralatan. Pada awal pandemi, sebagian besar petugas kesehatan menggunakan jas hujan daripada baju medis (Al Jazeera, 2020). Untuk mengatasi kelangkaan APD, sekitar 3000 pabrik tekstil memulai produksi APD pada awal April 2020 (Al Jazeera, 2020).

Pemerintah provinsi di Indonesia juga turut melakukan investigasi dan pelacakan penularan dan epidemiologi: Pemerintah provinsi memainkan peran penting dalam pelacakan kontak, karantina kontak, dan isolasi kasus. Beberapa provinsi, termasuk Jakarta, memberlakukan penguncian dan memulai penyelidikan epidemiologis terhadap kasus yang dicurigai. Setelah kasus awal Covid-19 dilaporkan di Provinsi Maluku, misalnya, gubernur mulai membatasi kedatangan ke provinsi tersebut untuk membatasi penyebaran virus. Di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah provinsi meluncurkan Program Jogo Tonggo untuk mendorong warga bekerja sama dengan cara tradisional, seperti saling memantau kesehatan, menjaga jarak sosial, dan memberikan dukungan keuangan dengan berbagi dan barter. Di Kalimantan Selatan, program Kampung Tangguh membantu desa

untuk menegakkan upaya kesehatan masyarakat dengan memantau variabel-variabel tertentu (WHO, 2020). Di Sulawesi Selatan, Program Duta Covid-19 yang inovatif dirancang untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan dengan memberikan informasi kepada Keberlanjutan setempat 2021, 13, 5620 7 dari 15 komunitas (WHO, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia bersifat aktif dan reaktif menghadapi pandemi Covid-19 di level daerahnya.

Sebuah survei di kalangan mahasiswa di Jambi menunjukkan bahwa sekitar 60 mahasiswa mengidentifikasi respons pemerintah daerah dengan baik, meskipun sekitar 70% mahasiswa percaya bahwa pandemi berada pada tahap kritis (Saputra, 2020). Pada awal pandemi, pemerintah daerah mulai melacak dan mengumumkan jumlah kasus secara terpisah, yang akhirnya membuat kebingungan besar hingga pemerintah pusat mengambil tindakan untuk menjadi satu-satunya otoritas yang memberikan pembaruan (Daniel & Adriyan, 2020). Transparansi data telah sangat dikritik dalam arti pelaporan yang kurang dan kurangnya transparansi yang mempengaruhi respon pemerintah (Daniel & Adriyan, 2020). Dikatakan bahwa jumlah orang yang meninggal karena Covid-19 bisa tiga kali lebih besar dari angka resmi (Human

Right Watch, 2020). Selain itu, pemerintah daerah ikut serta dalam mengurangi dampak pandemi pada layanan publik lokal lainnya: Pemerintah provinsi bermitra dengan organisasi internasional untuk mendistribusikan pasokan air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) untuk fasilitas kesehatan, sekolah, tempat umum, dan rumah tangga. Kit kebersihan yang dirancang khusus, termasuk barang-barang untuk kebersihan tangan, dikirim untuk didistribusikan ke pasien Covid-19, populasi berisiko tinggi, dan rumah tangga yang rentan. Berikutnya yaitu mendukung kegiatan bantuan sosial dan ekonomi: Pemerintah provinsi bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal untuk meningkatkan cakupan dan manfaat bantuan tunai tanpa syarat selama pandemi. Meski demikian, pandangan masyarakat terhadap keadaan ekonomi menurun drastis pada sembilan bulan pertama tahun 2020. Pada Mei, 65% masyarakat Indonesia melaporkan kondisi keuangannya memburuk dibandingkan 2019, sedangkan rasio ini sebesar 21% pada Februari (Sevindik et al., 2021). Selain itu, pada Oktober 2020, undang-undang baru mulai berlaku yang mengakibatkan berkurangnya hak-hak buruh seperti upah minimum, tunjangan, pesangon, dll (Sevindik et al., 2021).

Upaya Jawa Barat dalam Menghadapi Covid-19 melalui Diplomasi Daerah

Penanganan Covid-19 perlu diterapkan dengan menggunakan pendekatan yang menyesuaikan dengan kondisi daerah-daerah. Jawa Barat sendiri memiliki respon yang berbeda tetapi dengan fokus yang sama dengan daerah-daerah lainnya, yaitu melalui tiga strategi utamanya 1) preventif dengan penerapan *scale-up* dari PSBB yaitu AKB atau Adaptasi Kegiatan Baru; 2) tes dan tracking melalui inovasi aplikasi pilkobar; 3) juga meningkatkan fasilitas kesehatan diseluruh pusat kesehatan di daerah Jawa Barat (Herdiana, 2020; Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020). Walaupun daerah ini berada pada tingkatan ke-19 dari skala dampak Covid-19 secara nasional dan juga memiliki fasilitas kesehatan pra-pandemi yang sudah tersebar hampir di seluruh kawasan daerah dan juga tertinggi di Pulau Jawa (Pusparisa, 2020; Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020), tetapi tidak menutup semangat para pimpinan serta pemerintahan daerah baik dari tingkat provinsi maupun kota bahkan hingga tingkat universitas untuk bergotong-royong memformulasikan suatu kebijakan atau inovasi yang dapat memudahkan proses penanganan pandemi di daerah ini. Beberapa tindakan yang merefleksikan semangat ini adalah aktivitas-

aktivitas hubungan diplomasi daerah yang mulai diinisiasikan oleh para pemeritah Jawa Barat demi mendorong implementasi kebijakan strategisnya dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama dalam sektor keamanan dan kesehatan melalui peningkatan layanan kesehatan.

Sebagai daerah yang sudah berpengalaman dalam berhubungan luar negeri dengan entitas asing demi kepentingan daerahnya, dengan terutamanya pada sektor ekonomi (Dharmajaya & Raharyo, 2019). Jawa Barat dalam menghadapi pandemi baik dari tingkat pemerintah provinsi, kota, hingga universitas juga telah menginisiasi diplomasi daerah dalam konteks kesehatan selama pandemi Covid-19 berlangsung saat ini. Maka dari itu, penulis dalam hal ini akan memberikan gambaran aktivitas diplomasi daerah dalam wilayah ini kedalam tiga bagian, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan universitas, menimbang bahwa ketiganya memiliki pendekatan dan bentuk kerjasama yang cukup berbeda.

Dari tingkat pemerintah provinsi, Jawa Barat cenderung menginisiasi tindakan diplomasi daerah yang berada pada tahap awal, dan termasuk dalam kategori *negotiating*. Beberapa tindakan diplomasi daerahnya dapat direfleksikan dengan usaha pertemuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Republik Ceko

pada bulan juni yang lalu (Tessar, 2021). Dalam kegiatan tersebut, Jawa Barat sebagai aktor diplomasi daerah melakukan diplomasi dengan Pemerintah Republik Ceko untuk melakukan investasi layanan kesehatan di daerahnya demi mendukung pengawalan laju penanganan Covid-19 di Jawa Barat (Tessar, 2021). Tapi tidak terbatas hal tersebut, pertemuan tersebut juga dapat membuka potensi investasi lainnya seperti ekonomi yang dapat mendorong sektor keamanan manusia pasca Covid-19 di Jawa Barat). Tidak hanya dengan negara, jalur diplomasi daerah lainnya yang ditempuh oleh Jawa Barat juga menjalar pada aktor-aktor yang berasal dari MNC (*Multinational Corporation*) seperti Shopee. Kerjasama yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Shopee bertumpu pada kerjasama distribusi vaksin Covid-19 di kawasan Jawa Barat, sehingga dapat mempercepat proses vaksinasi penduduk di kawasannya (Shopee, 2021).

Dari tingkat pemerintahan kota misalnya, seperti Pemerintahan Kota Bandung, pola dan bentuk diplomasi daerah yang dijalankan lebih sebagai hasil manfaat dari tindakan diplomasi yang sebelumnya. Dalam hal ini, tindakan diplomasi daerah dalam bentuk *sister cities* yang telah dijalankan oleh pemerintahan kota ini dari jauh-jauh hari sebelumnya telah

menghasilkan buah yang baik bagi penanganan Covid-19 di wilayahnya. Pasalnya, kini Pemerintah Kota Bandung telah menerima banyak fasilitas kesehatan seperti bantuan masker dari para mitra *sister cities* yang telah menandatangani perjanjian sebelumnya. Seperti bantuan masker sebanyak 20.000 dari kota Zhengzhou, 10.000 masker dari kota Suwon dan 10.000 masker dari kota Liuzhou. Masker-masker ini akan didistribusikan kepada pihak-pihak medis dan masyarakat yang membutuhkan (Pemerintah Kota Bandung, 2020).

Dalam tingkatan lainnya, yaitu universitas-universitas di Jawa Barat, khusus Institut Teknologi Bandung, juga berpartisipasi memudahkan penanganan Covid-19 dengan melakukan diplomasi daerah dalam bentuk kerjasama dengan universitas di Jepang, yaitu Osaka University. Pertemuan antar kedua entitas universitas pada bulan maret lalu membicarakan mengenai diplomasi ITB untuk bekerjasama dengan pihak RMID Osaka University dalam penelitian, dan pembuatan vaksin khususnya vaksin merah putih yang kini sedang dikembangkan ITB untuk Indonesia (Permana, 2021). Selain itu, kerjasama ini juga ditujukan untuk mendorong tidak hanya proses penelitian vaksin di kawasan Jawa Barat, tetapi juga bagi Indonesia, dan Tata Kesehatan Global secara umum (Permana, 2021).

Tiga tingkatan diplomasi daerah di atas menjelaskan bahwa sejatinya tiap tingkatan memiliki pengalaman, dan pola diplomasi yang berbeda dari, yang mana pada tingkatan pemerintah provinsi, diplomasi daerah yang ditekankan bersifat masif dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Jawa Barat secara keseluruhan. Diplomasi daerah dalam tingkatan kota cenderung merefleksikan sebuah manfaat jangka panjang dari kerjasama *sister cities* yang tidak hanya merambah sektor ekonomi, tetapi juga kesehatan. Selain itu dalam tingkatan universitas di daerah Jawa Barat, pola dan bentuk diplomasi daerah ditujukan untuk kebermanfaatan jangka panjang, yaitu kerjasama riset vaksin yang tidak hanya berguna bagi daerah Jawa Barat, tetapi juga bagi Indonesia dan Tata Kesehatan Global.

Simpulan

Covid-19 telah menghancurkan sektor ekonomi hingga tata kesehatan global. Semua negara di dunia terkena imbasnya, begitupula daerah-daerah di dalamnya. Meski Covid-19 memberikan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seluruh dunia, tetapi pandemi ini juga telah menjelaskan peran dan memberi peluang baru bagi tiap-tiap aktor yang terlibat dalam tata

kesehatan global. Kehadiran pandemi Covid-19 telah menjelaskan peran negara maju dan negara berkembang untuk saling bekerjasama mempercepat proses penanganan pandemi di seluruh dunia. Tidak hanya itu, pandemi ini juga telah memberikan suatu realita bahwa pada dasarnya tiap-tiap daerah di suatu negara tidak selalu mengalami dampak yang sama dari krisis kesehatan global ini. Maka dari itu, diperlukan adanya reformasi dan implementasi kebijakan kesehatan nasional terdesentralisasi disesuaikan dengan kondisi daerahnya sehingga daerah kini tidak hanya menjadi pemangku pelaksana kebijakan nasional di lapangan, tetapi juga dapat memformulasikan kebijakan kesehatannya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas daerahnya.

Dalam kasus pemerintah daerah Jawa Barat, didapati bahwa pemerintah provinsi daerah ini telah memberikan inovasi dari pilkobar hingga penerapan *scale-up* PSBB yaitu AKB dan juga menerapkan strategi menghadapi pandemi Covid-19 yang bertumpu pada peningkatan layanan kesehatan di kawasannya. Tentunya, meski daerah ini sudah terhitung sebagai daerah dengan fasilitas kesehatan terbaik di Pulau Jawa, tetapi tindakan-tindakan lain untuk mendukung proses penanganan pandemi tetap dilakukan, seperti diplomasi daerah dalam sektor kesehatan dan

keamanan di Jawa Barat. Tujuan diplomasi daerah Jawa Barat kepada entitas asing dalam tulisan ini ditemukan untuk memfasilitasi kerjasama peningkatan pelayanan kesehatan jangka panjang, serta riset vaksinasi yang dapat mendukung sumber ilmu bagi tata kesehatan global. Tindakan diplomasi daerah yang dilakukan oleh Jawa Barat semata-mata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi, tetapi pemerintah kota, bahkan hingga universitas juga mempraktikkan hal tersebut, dan juga dengan target aktor diplomasi yang bervariasi seperti negara, MNC, kota, dan universitas. Hal ini menunjukkan bahwa demi mendukung usaha penanganan pandemi Covid-19, daerah ini telah cukup mengoptimalkan potensi diplomasi daerah dengan infrastruktur yang dimilikinya sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya. Untuk mengadopsi bentuk kebijakan dan diplomasi daerah yang serupa dalam menghadapi Covid-19 yang dampaknya sangat besar.

Referensi

Abubakar, R. W. A. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Jawa Barat di Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi. *Jurnal Unsur*.
jurnal.unsur.ac.id/JA/index

- Alam, M. M., Fawzi, A. M., Islam, M. M., & Said, J. (2021). Impacts of COVID-19 pandemic on national security issues: Indonesia as a case study. *Security Journal*. <https://link.springer.com/article/10.1057/s41284-021-00314-1>.
- Al Jazeera. (2020, April 22). *Indonesia's coronavirus response revealed: Too little, too late*. Al Jazeera. Retrieved January 3, 2022, from <https://www.aljazeera.com/news/2020/4/22/indonesias-coronavirus-response-revealed-too-little-too-late>
- Alvarez, M. (2020, July 1). *Opinion — Paradiplomacy in Times of Pandemic: The Paths Ahead*. E-International Relations. Retrieved December 28, 2021, from <https://www.e-ir.info/2020/07/01/opinion-paradiplomacy-in-times-of-pandemic-the-paths-ahead/>
- Alvarez, M., & Oddone, N. (2020, August 5). *Opinion – Revisiting Paradiplomacy in the Context of COVID-19*. E-International Relations. Retrieved December 28, 2021, from <https://www.e-ir.info/2020/08/05/opinion-revisiting-paradiplomacy-in-the-context-of-Covid-19/>
- Bailey, D., & Et al. (2020). Regions in a time of pandemic. *Regional Studies*, 54(9).
- BBC News. (2021, December 23). Covid map: Coronavirus cases, deaths, vaccinations by country.

- Chatterji, R., & Saha, S. (2017). Para-diplomacy: Concept and the Context. *India Quarterly*, 73(4), 375–394. <https://doi.org/10.1177/0974928417731638>
- Cooper, A. F., Heiner, J., & Thakur, R. (2013). Introduction: The Challenges of 21st-Century Diplomacy. In *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford University Press. 10.1093/oxfordhb/9780199588862.013.0001
- Daniel, J., & Adriyan, R. (2020, September 24). *How to fix Indonesia's Covid-19 governance problem*. Indonesia at Melbourne. Retrieved January 3, 2022, from <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/how-to-fix-indonesias-Covid-19-governance-problem/>
- Dharmajaya, A. F., & Raharyo, A. (2019). Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province Cooperation between West Java, Indonesia and South Australia. *Politica*, 10(1), 39–55. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1316/721>
- Djalantee, R., Setiadermaga, D., Lassa, J., Sudjatma, A., & Indrawan, M. (2020). Review Public Knowledge / Volume 2 Issue 1 ■ DOI 10.62771/pk.v2i1.22 and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Disaster Sci*, 6.
- Duchacek, I. D. (1990). Perforated Sovereignities: Towards A Typology Of New Actors In International Relations. In Panayotis Soldatos & H. J. Michelmann (Eds.), *Federalism and international Relations : The Role of Subnational Units* (pp. 47–62). Clarendon Press ; Oxford University Press.
- Grydehøj, A. (2014). Goals , Capabilities , and Instruments of Paradiplomacy By Subnational Jurisdictions. *Local Actions in a Global Context: Paradiplomacy by Subnational Jurisdictions*, 10–20. <http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&doi=10.1080/0966813032000084028&magic=crossref%7C%7CD404A21C5BB053405B1A640AFFD44AE3%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1080/0966813032000084028>
- Herdiana, D. (2020). Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 657–1714. 10.36636/jogiv.v2i2.442
- Huhn, N. (2020, October 22). *Indonesia's COVID-19 Response — Outbreak Observatory*. Outbreak

- Observatory. Retrieved January 3, 2022, from <https://www.outbreakobservatory.org/outbreakthursday-1/10/22/2020/indonesias-Covid-19-response>
- Human Rights Watch. (2021, Januari 13). *Indonesia: Weak Public Health Response to COVID-19*. hrw.com. Retrieved 12 29, 2021, from <https://www.hrw.org/news/2021/01/13/indonesia-weak-public-health-response-Covid-19#>
- Human Right Watch. (2020). *Sitemap*. Human Rights Watch. Retrieved January 3, 2022, from <https://www.hrw.org/sitemap>
- Jackson, T. (2018). Paradiplomacy and political geography: The geopolitics of substate regional diplomacy. *Geography Compass*, 12(2), 1–11. <https://doi.org/10.1111/gec3.12357>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Indonesia Successfully Passes the First UN Resolution on Global Solidarity to Overcome COVID-19*. Kemlu. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1160/berita/indonesia-successfully-passes-the-first-un-resolution-on-global-solidarity-to-overcome-Covid-19#:~:text=%E2%80%8BNew%20York%2C%20United%20States,Nations%20Hea>
- Ketchell, M. (2021, February 25). Setahun pandemi di Indonesia: 3 kelemahan terbesar kebijakan pengendalian COVID-19 sehingga gagal total. *The Conversation*. <https://theconversation.com/setahun-pandemi-di-indonesia-3-kelemahan-terbesar-kebijakan-pengendalian-Covid-19-sehingga-gagal-total-155129>
- Kickbusch, I. (2007). Global Health Diplomacy: the Need for New Perspectives, Strategic Approaches and Skills in Global Health. *Bulletin of the World Health Organization*, 85(3), 230-232. <https://www.who.int/bulletin/volumes/85/3/06-039222/en/Pp.161-244>
- Kumar, D. R., & Sharma, P. K. (n.d.). Coronavirus: A Review of COVID-19. *EJMO*, 4(1), 8-25.
- Kutnezsov, A. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy*. Routledge. <http://opac.lib.idu.ac.id/unhan-ebook/assets/uploads/files/05377-027.theory-and-practice-of-paradiplomacy.pdf>
- Luerdi. (2022). Para-Diplomacy in Time of Covid- 19: Jakarta Regional Government's Objectives in Hosting International Youth Championship. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(1), 38–51. <https://doi.org/https://doi.org/10>

- [.32699/resolusi.v5i1.2782](#)
- McHugh, J. T. (2015). Paradiplomacy, protodiplomacy and the foreign policy aspirations of Quebec and other Canadian Provinces. In *Canadian Foreign Policy Journal*.
<https://doi.org/10.1080/11926422.2015.1031261>
- Morisson, A., & Doussineau, M. (2019). Regional innovation governance and place-based policies: design, implementation and implication. *Regional Studies, Regional Science*, 6(1), 101-116.
- Nainggolan, P. P. (2020, March 18). Wabah Corona dan Keamanan Nasional. *TEMPO*.
<https://kolom.tempo.co/read/1320840/wabah-corona-dan-keamanan-nasional/full&view=ok>
- OECD. (2020, July 23). *Cities Policy Responses*. OECD Library. Retrieved 12 28, 2021, from at: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126769-yen45847kf&title=Coronavirus-COVID-19-Cities-Policy-Responses,
- Pasan, E. (2017). Memaknai Posisi Pemerintah Daerah Dalam Studi Hubungan Internasional: Paradiplomasi Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penyelenggaraan Erau
- Public Knowledge / Volume 2 Issue 1
■ DOI 10.62771/pk.v2i1.22
- International Folk Art Festival (EIFAF). *Dinamika Global*, 5(1), 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4366>
- Pemerintah Kota Bandung. (2020, September 22). *Serah Terima Bantuan 20.000 masker dari Mitra Sister City Suwon, Korea Selatan di Ruang Kenegaraan Wali Kota Bandung - Bagian Kerja Sama Kota Bandung*. Bagian Kerja Sama Kota Bandung. Retrieved January 3, 2022, from <http://kerjasama.bandung.go.id/2020/09/22/serah-terima-bantuan-20-000-masker-dari-mitra-sister-city-suwon-korea-selatan-di-ruang-kenegaraan-wali-kota-bandung>
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2020, May 13). *Respons Kebijakan Pemprov Jabar dalam Menanggulangi Wabah COVID-19*. smeru.or.id. Retrieved January 3, 2022, from https://smeru.or.id/sites/default/files/events/ridwan_kamil_-_respons_kebijakan_pemerintah_provinsi_jawa_barat_dalam_menanggulangi_wabah_Covid-19.pdf
- Permana, A. (2021, March 5). *ITB dan RMID Osaka University Jalin Kerja Sama Pembuatan Vaksin* -. Institut Teknologi Bandung. Retrieved January 3, 2022, from <https://www.itb.ac.id/news/read>

- Pietrasiak, M., Bywalec, G., Kamiński, T., Mierzejewski, D., Słowikowski, M., & Kamiński, T. (2018). Paradiplomacy – Discourse Analysis and Research Conceptualization. In *Paradiplomacy in Asia. Case studies of China, India and Russia*. <https://doi.org/10.18778/8088-615-5.02>
- Purbantina, A. P., & Hapsari, R. D. (2020). Diplomasi Kesehatan di Era Pandemi Global: Analisa Bantuan Penanganan Covid-19 dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia. *Global & Policy*, 8(6).
- Pusparisa, Y. (2020, April 8). *Jawa Barat Mendominasi Fasilitas Kesehatan di Jawa | Databoks*. Databoks. Retrieved January 3, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/jawa-barat-mendominasi-fasilitas-kesehatan-di-jawa>
- Saputra, M. B. (2020, November 24). *COVID-19 is eroding Indonesian local media's role as watchdog*. New Mandala. Retrieved January 3, 2022, from <https://www.newmandala.org/Covid-19-is-eroding-indonesian-local-medias-role-as-watchdog/>

- Sevindik, I., Tosun, M. S., & Yilmaz, S. (2021). Local Response to the COVID-19 Pandemic: The Case of Indonesia. *Sustainability*, 13, 5620. <https://doi.org/10.3390/su13105620>
- Shopee. (2021, April 12). *Shopee, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bekerja Sama untuk Vaksinasi Covid-19 dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi*. Press Release. Retrieved January 3, 2022, from <https://pressrelease.kontan.co.id/release/shopee-pemerintah-provinsi-jawa-barat-bekerja-sama-untuk-vaksinasi-Covid-19-dan-mempercepat-pemulihan?page=all>
- Soldatos, P. (1990). An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors. In *Federalism and International Relations*.
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. Oxford University Press.
- Tessar, N. (2021, June 23). *Pemprov Jabar Tingkatkan Kerjasama Bidang Kesehatan dengan Republik Ceko*. Liputan6.com. Retrieved January 3, 2022, from <https://www.liputan6.com/news/read/4589182/pemprov-jabar-tingkatkan-kerjasama-bidang-kesehatan-dengan-republik->

UCLG. (2020). *COVID-19 Monitors Of Relevance To Urban And Regional Governance*. United Cities and Local Governments. Retrieved December 28, 2021, from https://www.uclg.org/sites/default/files/egi_analytics_uclg_metropolis_lse.pdf

UNDP. (2006). *The Human Security Framework and National Human Development Report*. UNDP.

WHO. (2020, June 16). *COVID-19 Ambassador assists disease control in South Sulawesi, Indonesia*. WHO | World Health Organization. Retrieved January 3, 2022, from <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/Covid-19-ambassador-assists-disease-control-in-south-sulawesi-indonesia#:~%7B%7D:text=COVID%2D19%20Ambassador%20assists%20disease%20>

Wingard, M. (2020, March 30). *Looming Crisis in Developing Countries Threatens to Devastate Economies and Ramp Up Inequality*. United Nations Development Programme. https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html.

Wirawan, A., & AyuSwandewiAstuti, P. (2020, December 1). 'Nine months and no progress': what went wrong in Indonesia's COVID-19 responses and what can be done. The Conversation. Retrieved January 3, 2022, from <https://theconversation.com/nine-months-and-no-progress-what-went-wrong-in-indonesias-Covid-19-responses-and-what-can-be-done-145850>